

# Inflasi Penerimaan Pemerintah

Oleh : Iswardono Sp.

## Pendahuluan

Inflasi dikatakan "moderate", sedang atau lunak kalau mempunyai laju antara 15-30% per tahun. Ada beberapa negara yang telah berhasil meredam dan mengurangi laju inflasi dari "triple digit" menjadi "moderate" antara lain Columbia, Bolivia, Chile, Costa Rica dan sebagainya.

Untuk itu perlu dicari jawaban atas 3 (tiga) pertanyaan yang menyangkut "inflasi lemah", yaitu :

- (1) Apa yang menjadi sebab terjadi "inflasi-lunak?"
- (2) Apakah laju onflasi-lunak ini stabil berfluktuasi atau cenderung meningkat?
- (3) Kebijakan apa yang mampu membuat inflasi-lunak menjadi "single-digit".

Dari jawaban atas pertanyaan di atas memerlukan pemahaman teori inflasi secara mendalam. Untuk itu perlu ditengok kembali khasanah dunia pustaka inflasi.

## Kenapa inflasi muncul?

Ada 2 (dua) jawaban mendasar tentang kenapa inflasi muncul, yaitu :

- (1) Inflasi merupakan bagian integral dari keuangan/budget negara.
- (2) Inflasi berkelanjutan karena terlalu

sukar atau terlalu mahal untuk menghentikan.

Sejarah menunjukkan bahwa paling tidak sejak tahun 1920-an penciptaan uang baru menjadi salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran. Sebagaimana ditunjukkan oleh Keynes (1923), berkaitan dengan pengalaman terjadinya "hyper inflation" di Jerman dan Rusia, dengan jelas bahwa pemerintah yang lemah selalu menggunakan pencetakan uang baru untuk menutup kekurangan anggarannya. Hal ini dibenarkan oleh Brunner (1975) bahwa untuk menjawab penyebab inflasi perlu diketahui terlebih dahulu sektor anggaran pemerintah, artinya bagaimana proses politik penyusunan anggaran pemerintah. Dan oleh Phelps (1973) dan Fischer (1983) dipertegas bahwa "seigniorage argument" merupakan hal yang relevan dalam mencari inflasi optimal. Karena "seigniorage" merupakan "penghasilan" pemerintah dari penciptaan uang baru akibat adanya inflasi. Ini berarti bahwa ada perbedaan antara Jumlah Uang Beredar (JUB) nominal dan JUB riil. Jadi semakin tinggi inflasi semakin besar selisih JUB nominal dengan JUB riil dan semakin besar pula "seigniorage" yang diterima pemerintah (walaupun tidak riil). \*) . Artinya kalau pemerintah menambah

---

$$*) \quad \text{Seigniorage} : \frac{\Delta M}{M} \cdot \frac{M}{P} = \frac{\Delta M}{P}$$

---

\*) Drs. Iswardono, Sp. M.A adalah Dosen Fakultas Ekonomi Gadjah Mada Yogyakarta.

JUB sebesar "X", maka jumlah riilnya tidak sebesar itu, harus dideflasikan dengan laju inflasi.

Argumen ini cukup beralasan bahkan di negara yang mengalami "inflasi sedang" karena adanya pencetakan uang yang bersifat inflatoir akan memberikan penghasilan bagi pemerintah. Penghasilan atas pencetakan uang merupakan penjumlahan dari 2 (dua) faktor, yaitu :

- (1) yang disebabkan karena pencetakan uang baru yang bersifat inflatoir, dan
- (2) pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan dalam permintaan uang.

Dan oleh Friedman (1971) dicatat bahwa peranan dalam pertumbuhan pendapatan riil sebagai sumber dari penghasilan seigniorage tersebut. Secara matematis ditunjukkan sebagai berikut :

$$M/P = [\pi + (n + \eta g)] m$$

dimana :

$\Delta M$

$M = \frac{\Delta M}{M}$  = perubahan jumlah uang beredar

$P$  = indeks harga konsumen

$\pi$  = laju inflasi

$n$  = laju pertumbuhan penduduk

$\eta$  = elastisitas pendapatan dari permintaan uang

$g$  = laju pertumbuhan pendapatan per capita

$m$  = uang kas riil per capita

Dalam hal ini Friedman memusatkan perhatiannya adanya "trade off" antara penghasilan "seigniorage" dari pencetakan uang yang inflator,  $\pi m$  dan hasil yang didapat dari pencetakan uang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi  $(n + \eta g)m$ .

Artinya dengan laju inflasi yang lebih tinggi, uang kas riil berkurang dan akibatnya yang terjadi adalah pertumbuhan yang semakin kecil.

Dengan menggunakan permintaan uang kas riil dan Cagan, dimana

$M/P = N f(\eta)e^{-b\pi}$ , dimana  $N$  adalah jumlah penduduk

Maka laju inflasi yang memaksimumkan penghasilan adalah

$$\pi = 1/b - (n + \eta g)$$

dimana  $(n + \eta g)$  adalah modifikasi dari Friedman.

Pada saat laju inflasi tinggi, modifikasi dari Friedman di atas berubah relatif kecil dalam menghasilkan penghasilan di atas. Menurut Cagan (1956) perkiraan besarnya "b" sekitar 6 bulan atau setengah tahun. Dengan besarnya  $b = 6$  bulan, maka puncak kurva Laffer untuk seigniorage mencapai 200 persen per tahun. Dengan anggapan bahwa  $\eta = 1$ , inflasi yang menghasilkan seigniorage akan mencapai 190 persen, bahkan untuk pertumbuhan riil setinggi 10 persen per tahun.<sup>1</sup>

Menurut Bailey, laju inflasi akan semakin tinggi di negara-negara dimana alternatif sumber pembiayaan sangat mahal, sebagaimana di negara Amerika Latin. Bagaimana dengan di negara kita yang mencoba untuk meredam laju inflasi di bawah angka 10% per tahun. Apakah hal ini menunjukkan kemudahan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan APBN? Karena dengan laju inflasi yang rendah tentunya "seigniorage" akan semakin rendah pula dan akhirnya yang diterima pemerintah juga rendah. Untuk itu perlu

<sup>1</sup> Rudiger Dornbusch and Stanby Fischeer, Moderate Inflation, The World Bank' Economic Review, Vol 7, No. 1, 1993

dilihat perkembangan laju inflasi di Indonesia selama 2-3 tahun terakhir ini (tabel 3.1).

Kenaikan JUB, baik dalam artian luas maupun sempit menunjukkan laju yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi itu sendiri. Ini berarti bahwa kenaikan riil JUB tetap masih tinggi sehingga "seigniorage" yang diterima pemerintah relatif kecil. Sedangkan untuk melihat sumber-sumber dana pembiayaan pemerintah tentunya perlu dilihat pada APBN.

### Inflasi dan Penerimaan Pemerintah di Indonesia

Inflasi di Indonesia akan dikendalikan di bawah 10 persen merupakan komitmen pemerintah. Ini disebabkan

karena dalam tiga bulan pertama tahun 1993 sudah menunjukkan angka 6,44%. Ini berarti tinggal 3,56% lagi untuk mencapai "double digit".

Ada yang mensinyalir tingginya laju inflasi selama tiga bulan pertama tahun 1993 ini karena kebijaksanaan pemerintah dalam hal pengenaan tarif, kenaikan gaji PNS/ABRI, pencetakan uang baru pecahan Rp. 50.000,00 dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebut bencana alam seperti : banjir, tanah longsor dan lainnya sebagai penyebab inflasi tersebut. Ada pula yang masih takut akan adanya ekspansi moneter menyebabkan inflasi. Untuk itu perlu diperhatikan ada tidaknya hubungan antara perubahan JUB baik  $M_1$  maupun  $M_2$  terhadap laju inflasi selama 2-3 tahun terakhir ini.

Tabel 3.1  
Laju Inflasi, Laju Perubahan JUB ( $M_1$  &  $M_2$ )  
dalam persen selama 1991 - 1992

Laju				Laju			
Bulan	Inflasi	$M_1$	$M_2$	Bulan	Inflasi	$M_1$	$M_2$
Jan '91	0,73	22,07	43,75	Jan '92	0,44	13,96	16,97
Februari	0,30	35,89	40,52	Februari	0,26	-0,02	17,26
Maret	0,03	06,39	26,03	Maret	0,65	15,90	24,25
April	1,89	04,34	23,70	April	0,92	11,54	23,08
Mei	0,18	10,77	28,49	Mei	0,11	11,24	23,80
Juni	0,44	06,05	25,14	Juni	0,65	09,08	21,84
Juli	1,89	04,81	24,87	Juli	0,23	13,90	21,10
Agustus	1,90	09,82	23,10	Agustus	0,16	11,20	20,90
September	0,12	12,28	21,35	September	0,20	-	-
Oktober	0,76	11,57	21,81	Oktober	0,41	-	-
Nopember	1,06	12,37	21,03	Nopember	0,25	-	-
Des. '91	0,19	- 10,59	17,05	Des. '92	0,66	-	-

Sumber : Warta Ekonomi, No. 02/V/7 Juni 1990

Adapun laju inflasi selama 3 bulan pertama 1993 sudah mencapai 6,44%. Apakah ini akan berakibat bahwa laju inflasi di akhir 1993 akan melebihi angka 10%? Nampaknya pemerintah tidak akan membiarkan angka tersebut meloncat, sehingga pemerintah dengan berbagai jurus kebijaksanaannya mencoba menghambat tersebut. Hal ini dilakukan mengingat dampak inflasi yang bersegi banyak. Artinya menyangkut bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya (istilah P-

#### 4. SOSPOLEK).

Dan dari sisi penerimaan pemerintah dalam antrian "seigniorage" ada kecurigaan bahwa pemerintah mengalami kesulitan sehingga perlu menginflasikan perekonomian. Kalau dilihat pada berbagai sumber penerimaan dalam negeri sebagai mana pada tabel berikut ini, nampaknya tidak ada kesulitan, karena ada peningkatan pada penerimaan dari luar minyak dan gas alam.

Tabel 3.2  
Penerimaan Dalam Negeri, 1984/85 - 1992/93  
(dalam milyar)

Tahun	Sumber	Penerimaan Minyak Bumi dan Gas	Penerimaan di luar Minyak Bumi & Gas	Penerimaan Dalam Negeri
<b>Repelita IV</b>				
	1984/85	10.429,9	5.475,6	15.905,5
	1985/86	11.144,4	8.108,4	19.252,8
	1986/87	6.337,6	9.803,0	16.140,6
	1987/88	10.047,2	10.756,1	20.803,3
	1988/89	9.527,0	13.477,3	23.004,3
<b>Repelita V</b>				
	1989/90	11.252,1	17.487,7	28.739,8
	1990/91	17.711,9	21.834,5	39.546,4
	1991/92	15.039,1	26.545,7	41.584,8
	1992/93	13.947,5	32.560,9	46.508,4
	1993/94	-	-	-

Sumber : Nota Keuangan & RAPBN 1993/94.

Apakah ini sumbernya dari pajak? Tabel berikut akan merincinya.

Tabel 3.3  
Penerimaan Pajak, 1984/85 - 1992/93

Tahun	PP	PPN	B.M	Cukai	P.E	P.B.B	P.L	Jumlah
<b>Repelita IV</b>								
1984/85	2.121,0	878,6	530,1	872,6	91,0	180,6	115,0	1.788,3
1985/86	2.313,0	2.326,7	607,3	943,7	50,5	224,5	151,2	6.616,9
1986/87	2.270,5	2.900,1	960,1	1.055,8	78,8	190,0	190,4	7.645,7
1987/88	2.663,4	3.390,4	938,4	1.105,7	183,5	275,1	222,9	8.779,4
1988/89	3.949,4	4.505,3	1.192,0	1.389,9	155,6	424,2	292,1	11.908,5
<b>Repelita V</b>								
1989/90	5.487,7	5.826,7	1.587,0	1.476,8	171,5	590,4	275,5	15.425,6
1990/91	6.755,3	7.462,7	2.485,7	1.917,3	44,2	811,0	243,5	19.719,7
1991/92	9.580,4	8.926,1	2.133,1	2.222,8	18,8	874,6	302,6	24.058,4
1992/93	10.930,0	11.032,2	3.041,2	2.441,8	60,0	990,6	354,5	28.850,2

Sumber : Nota Keuangan & RAPBN 1993/94

**Keterangan:**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) PP = Pajak Penghasilan        | 4) P.E = Pajak Ekspor            |
| 2) PPN = Pajak Pertambahan Nilai | 5) PBB = Pajak Bumi dan Bangunan |
| 3) BM = Bea Masuk                | 6) P.L = Pajak Lainnya           |

Dari tabel di atas nampak bahwa ada usaha untuk menggali potensi pajak yang ada, baik melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi, dimana dari sumber penerimaan pajak yang sudah ada semakin digalakkan dan dari sumber yang belum ada akan dicoba digali. Usaha ini tentunya berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan dengan sumber dana sendiri.

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden pada Pidato Kenegaraan tahun ini bahwa:

".... Dan perjalanan panjang tadi memperkuat kesadaran kita bahwa perjuangan utama harus berpusat pada pembangunan ekonomi atas dasar kekuatan kita sendiri".

Ini bukan berarti pemerintah tidak mau menerima bantuan luar negeri baik yang bersifat bantuan program maupun bantuan proyek. Hanya dalam hal ini bantuan tersebut sebagai pelengkap dari sumber yang ada. Adapun besarnya bantuan tersebut sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4  
Penerimaan Pembangunan, 1984/85 - 1992/93  
(dalam milyar Rp)

Tahun	Bantuan Program <sup>1)</sup>	Bantuan Proyek	Jumlah
<b>Repelita IV</b>			
1984/85	69,3	3.408,7	3.478,0
1985/86	69,2	3.503,4	3.572,6
1986/87	1.957,5	3.794,7	5.752,2
1987/88	727,8	5.430,2	6.158,0
1988/89	2.040,7	7.950,0	9.990,7
<b>Repelita V</b>			
1989/90	1.007,2	8.422,1	9.429,3
1990/91	1.396,8	8.507,8	9.904,6
1991/92	1.563,4	8.845,7	10.409,1
1992/93 <sup>2)</sup>	501,2	9.099,0	9.600,0

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN 1993/94

- Keterangan: 1) Sejak 86/87, bantuan program termasuk bantuan LN dalam bentuk rupiah  
2) APBN

Jadi secara total penerimaan pemerintah baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri menunjukkan jumlah yang sangat besar. Sehingga tidak ada alasan untuk menambah JUB guna membiayai

defisit anggaran pemerintah. Hal ini nampak jelas pada tabel berikut ini, dimana jumlah penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.5  
Dana Pembangunan, 1984/85 - 1992/93  
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Repelita	Realisasi
<b>Repelita IV</b>		
1984/85	10.459,3	9.954,0
1985/86	12.849,0	10.873,9
1986/87	15.415,2	8.333,5
1987/88	18.543,4	9.479,8
1988/89	21.342,6	12.256,0
<b>Repelita V</b>		
1989/90	13.129,9	13.838,0
1990/91	16.168,9	19.453,3
1991/92	20.909,7	21.766,3
1992/93	25.687,0	22.912,0

Sumber : Nota Keuangan & RAPBN 1993/94

Sehingga nampak jelas bahwa sumber penerimaan pemerintah cukup besar dan mudah didapat. Karena antara realisasi dan Repelita untuk tahun-tahun Pelita V cukup mengembirakan dimana realisasi lebih besar dari pada rencananya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk mencetak uang baru guna membiayai pembangunan. Sehingga cukup mudah untuk diterima bahwa pemerintah sangat peduli sekali dengan laju inflasi jangan sampai "double digit".

### Kesimpulan

Presiden Soeharto menginstruksikan bahwa semua menteri di lingkungan ekonomi harus memperhatikan serius masalah inflasi dan perijinan investasi serta

tidak membuat kebijaksanaan yang bisa menimbulkan inflasi. Ditegaskan pula bahwa sampai akhir 1993 tingkat inflasi harus dipertahankan di bawah 10 persen.

Hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Berkaitan dengan "seigniorage" pemerintah tidak berharap banyak untuk mendapatkan penerimaan pemerintah dengan cara menginflasikan perekonomian.
- 2) Pemerintah yakin mempunyai sumber dana yang cukup diandalkan untuk melanjutkan pembangunan jangka panjang tahap II.
- 3) Berkaitan dengan inflasi sendiri pemerintah masih memandang bahwa inflasi merupakan "musuh"

pembangunan yang harus diberantas karena kalau inflasi dibiarkan dampaknya bersegi banyak yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pembangunan.

- 4) Dari sisi "honest government", pemerintah kita masih dikatakan "honest", karena tidak melakukan kecurangan dengan menginflasikan perekonomian, dengan demikian JUB nominal dan riil tidak jauh berbeda setiap waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan RAPBN*  
Tahun Anggaran 1993/94.

Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, *Moderate Inflation*, The World Bank Economic Review, volume 7 No. 1, 1993.

Warta Ekonomi, No. 02/V/7 Juni 1993.